

Fasilitas Asrama Haji Diperkuat, dari Studi Film Manasik sampai Mock Up Pesawat

Tangsel (Kemenag) --- Kementerian Agama terus memperkuat sarana dan fasilitas pelayanan kepada jamaah haji di asrama haji. Selain mock up pesawat sebagai ruang sosialisasi fasilitas dan layanan dalam perjalanan, hadir juga studio film untuk penayangan manasik haji.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis mencontohkan, bahwa di tahun 2020, asrama haji antara Gorontalo akan dibangun mock up pesawat.

"Ke depan dalam rangka meningkatkan pemahaman jemaah, semua asrama embarkasi maupun embarkasi antara punya prototipe mock up pesawat," ucap Muhajirin saat membuka Acara Bimtek Penyusunan dan Revisi Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bintaro, Selasa (21/01).

Acara tersebut diikuti oleh 29 Kakanwil Kementerian Agama Se Indonesia dan 10 UPT Asrama Haji.

"Kalau ada anggarannya tentu setiap tahun kita bangun," tambahnya.

Tujuan dibangunnya mock up pesawat di asrama haji adalah sebagai sarana sosialisasi dan praktik naik pesawat. Dengan begitu, jemaah haji Indonesia bisa memahami fasilitas dalam pesawat, mulai dari penggunaan sabuk pengaman, toilet, dan lainnya.

Selain mock up pesawat, asrama haji juga akan dilengkapi studio film manasik. Salah satu contohnya adalah asrama haji transit Yogyakarta. "Kami juga akan bangun studio film manasik di beberapa asrama haji," tambahnya.

"Pembangunan studio untuk manasik ini sebagai sarana penyampaian materi secara audio visual. Setelah itu, jemaah haji melakukan praktek langsung di lapangan," ucap Muhajirin.

Film manasik yang ditayangkan, lanjut Muhajirin, mulai dari proses pemberangkatan dari Tanah Air hingga proses ibadah di Tanah Suci. "Digambarkan juga suasana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sehingga ketika jamaah haji tiba di Tanah Suci, mereka tidak merasa asing lagi," ucapnya.

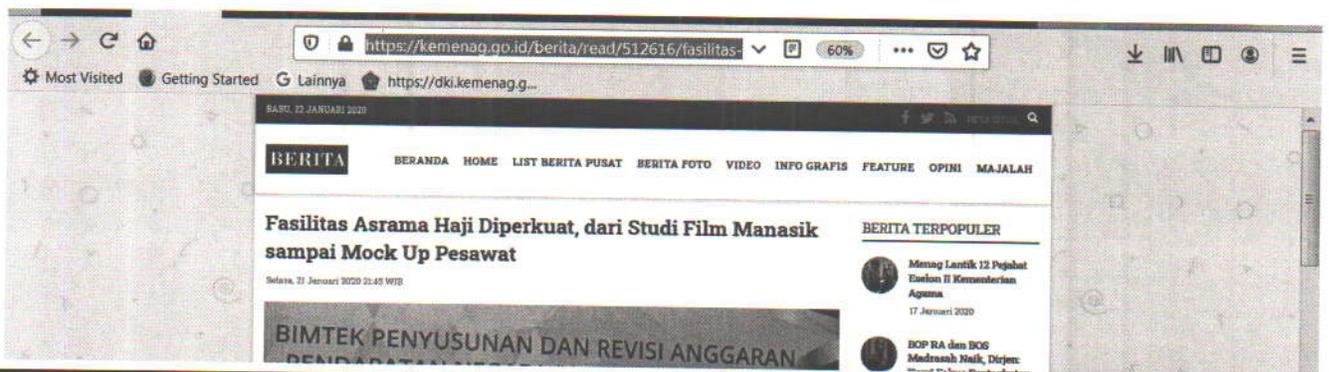
"Jadi kita dekatkan seperti yang ada di sana," tandasnya.

Sumber : -

Penulis : Boy Azhar

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512616/fasilitas-asrama-haji-diperkuat--dari-studi-film-manasik-sampai-mock-up-pesawat>



MAN IC Batam Kini Punya Gedung Pusat Pembelajaran dan Pelayanan

Batam (Kemenag) --- Fasilitas Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia (IC) Kota Batam makin lengkap. Madrasah binaan Kemenag tersebut kini memiliki dua infrastruktu baru, yaitu: Gedung Pusat Pembelajaran Terpadu dan Gedung Pusat Layanan Kegiatan Siswa.

Penggunaan dua gedung yang dibangun dengan skema pembiayaan SBSN tersebut diresmikan Menag Fachrul Razi saat berkunjung ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (21/01). MAN IC Kota Batam berada di Jalan Hang Lekiu, Kecamatan Nongsa Kota Batam.

Peresmian ditandai penguntingan pita di depan gedung oleh Menag. Ikut mendampingi, Kakanwil Kemenag Kepri Mukhlisuddin, Kepala Kankemenag Kota Batam Zulkarnain Umar, dan Plh Dirjen Bimas Islam Tarmizi Tohor.

Hadir juga Sekretaris Daerah Pemkot Batam Jefridin, Sesmen Khoirul Huda Basyir, dan Kepala MAN IC Kota Batam Rudianto beserta jajarannya.

"Manfaatkan gedung yang baru diresmikan ini dengan sebaik baiknya. Begitu juga dengan penambahan fasilitas seperti komputer dan laboratorium bahasa," kata Menag.

Menag lalu meninjau ruang ekskul di lantai dua Gedung Pusat Pembelajaran Terpadu. Menag pun mengaku senang dengan fasilitas madrasah kebanggaan masyarakat Kepri atau yang dijuluki Negeri Segantang Lada itu.

Bersama siswa MAN IC Kota Batam, Menag menyerukan yel yel siswa madrasah, yaitu: Sehat, Cerdas, dan Amanah. Tidak hanya itu, Menag kemudian meminta ratusan siswa madrasah untuk menyuarakan yel yel MAN IC yang layaknya yel yel prajurit TNI.

MAN IC hadir dengan visi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, kuat dalam keimanan dan ketaqwaan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain Bahasa Indonesia, ada tiga bahasa yang dipelajari, Bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin.

Sumber : -

Penulis : benny andriyos

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512615/man-ic-batam-kini-punya-gedung-pusat-pembelajaran-dan-pelayanan>



Kunjungi Maha Vihara Duta Maitreya, Menag Gelorakan Dunia Satu Keluarga

Batam (Kemenag) --- Menteri Agama Fachrul Razi mengunjungi Maha Vihara Duta Maitreya yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Tiba di Vihara terbesar di Asia Tenggara itu, Menag disambut oleh ratusan pelajar di Komplek Maha Vihara Duta Maitreya.

Di hadapan keluarga besar dan pelajar yang menuntut ilmu di Maha Vihara Duta Maitreya, Menag mengelorakan kerukunan umat beragama sesuai tema Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Ke 74, 'Umat Rukun, Indonesia Maju'.

Menag juga mengajak sengenap yang hadir untuk bersama-sama menjalani misi Dunia Satu Keluarga yang menjadi motto dari pendidikan di Maha Vihara Duta Maitreya.

"Dunia satu keluarga. Engkau dan aku satu keluarga. Seluruh dunia satu keluarga. Beda suku dan agama kita tetap satu keluarga," kata Menag yang diikuti pelajar dan keluarga besar Maha Vihara Duta Maitreya, Selasa (21/01) petang.

"Beda adat dan istiadat kita tetap satu keluarga. Beda tradisi dan budaya kita tetap keluarga," sambungnya.

Maha Vihara Duta Maitreya kerap dijadikan destinasi wisata untuk para pemeluk agama Buddha. Vihara ini didirikan pada 1991 di atas tanah seluas 4 hektar di bilangan Bukit Beruntung, Sungai Panas, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Maha Vihara Duta Maitreya diresmikan oleh Menteri Agama Malik Fadjar, pada tahun 1999.

Di akhir kunjungan di Maha Vihara Duta Maitreya, Menag menerima cinderamata berupa jam kebahagiaan yang mengandung pesan bahwa setiap detik umat Buddha senantiasa mendoakan kebahagiaan kepada Menag Fachrul Razi.

Tampak mendampingi Menag, Kakanwil Kemenag Kepri Mukhlisuddin, Kakankemenag Kota Batam, MUI, FKUB Kota Batam, Plh Dirjen Bimas Islam Tarmizi Tohor dan Sesmen Khoirul Huda Basyir.

Sumber : -

Penulis : benny andriyos

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512614/kunjungi-maha-vihara-duta-maitreya--menag-gelorakan-dunia-satu-keluarga->



Kemenag Identifikasi Nomor Seri Buku Nikah yang Dicuri

Jakarta (Kemenag) --- Sebanyak 366 buku nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Deket, Lamongan dicuri. Kasubdit Bina KUA Ditjen Bimas Islam Anwar mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan KUA Deket untuk mengidentifikasi nomor seri buku nikah tersebut.

“Sementara kasusnya dilaporkan ke kepolisian, Kami juga akan mengidentifikasi nomor seri buku nikah yang telah dicuri,” tegas Anwar di Jakarta, Selasa (21/01).

Menurutnya, buku nikah yang dibagikan ke KUA telah dilengkapi dengan nomor seri. Nomor seri buku nikah yang terdistribusikan ke KUA juga tercatat di Kantor Kemenag. Sehingga, nomor berapa saja buku nikah yang dicuri, bisa diidentifikasi.

“KUA atau Kemenag Lamongan akan segera menyampaikan laporan detail kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, tentang jumlah buku yang hilang berikut nomor serinya,” jelas Anwar

“Setelah teridentifikasi, kami akan membuat surat edaran ke Kanwil Kemenag Provinsi untuk diteruskan ke Kankemenag Kab/Kota hingga KUA. Isinya, bahwa buku dengan nomor seri dimaksud sudah tidak berlaku,” sambungnya.

Pencurian 366 buku nikah KUA Deket diketahui pada Minggu (19/1), saat salah satu pegawai, Siti Muzayamah, kerja lembur. Setibanya di KUA, Siti Muzayamah mendapati pintu belakang kantor sudah terbuka. Setelah melakukan pengecekan, ternyata pintu ruang Kepala KUA juga dirusak dan almari penyimpanan arsip terbuka.

Sumber : -

Penulis : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512613/kemenag-identifikasi-nomor-seri-buku-nikah-yang-dicuri>

Screenshot of a news article on the Kemenag website. The article title is "Kemenag Identifikasi Nomor Seri Buku Nikah yang Dicuri". The text describes the theft of 366 marriage books from the KUA Deket office in Lamongan and the steps taken by the Ministry of Religious Affairs to identify the stolen books. The article is dated Tuesday, January 21, 2020, at 14:49 WIB. The screenshot also shows the website's navigation menu, a "BERITA TERPOPULER" section with several other news items, and a browser address bar showing the URL: <https://kemenag.go.id/berita/read/512613/kemenag-identifikasi-nomor-seri-buku-nikah-yang-dicuri>.

'Umat Rukun Indonesia Maju', Pesan Menag di Prasasti Masjid Cheng Ho Batam

Batam (Kemenag) --- Rintik hujan menguyur Kota Batam siang itu. Usai memberi arahan dalam silaturahmi bersama tokoh lintas agama dan ASN Kemenag Kepulauan Riau serta meresmikan sejumlah bangunan KUA, Madrasah dan rumah Moderasi Bergama, Menag Fachrul Razi menunaikan Salat Dzuhur di Masjid Muhammad Cheng Ho, Selasa (21/01).

Mesjid dengan arsitektur bangunan Tiongkok ini sontak ramai. Menag pun disambut dengan shalawat dan iringan tabuhan Kompang. Turut mendampingi Menag, Kakanwil Kemenag Kepri Mukhlisuddin, Plh Dirjen Bimas Islam Tarmizi Tohor, Sesmen Khoirul Huda Basyir dan Forkominda Provinsi Kepulauan Riau dan Pemkot Kota Batam.

Usai menunaikan Salat Dzuhur, Menag menandatangani prasasti sekaligus menuliskan pesan kerukunan. Pesan kerukunan yang ditulis Menag di atas prasasti yakni Umat Rukun Indonesia Maju.

Masjid Muhammad Cheng Ho berdiri megah di kawasan Golden City, Bengkong Kota Batam. Masjid yang dibangun oleh seorang pengusaha Batam ini sebagai upaya mengenang sejarah perjalanan seorang Laksamana Tiongkok dan anak buahnya ke Indonesia yang membawa ajaran Islam. Keberadaan masjid ini membuktikan kulturasi antara budaya China, Islam dan Indonesia terjalin begitu erat di kota Batam.

Masjid yang dibangun tanpa kubah ini dihiasi berbagai ornamen berpadu dengan rangkaian huruf-huruf Arab. Masjid Cheng Ho diresmikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo dan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada 21 Februari 2015.

Dari keterangan yang terpajang di dinding sebelah kanan mesjid, Cheng Ho adalah seorang laksamana laut yang datang dari Tiongkok. Ia dipercaya memimpin ekspedisi pelayaran dengan membawa lebih kurang 27.000 anak buahnya berlayar menuju Indonesia. Peristiwa ini terjadi sebanyak 7 kali dalam kurun waktu di tahun 1416.

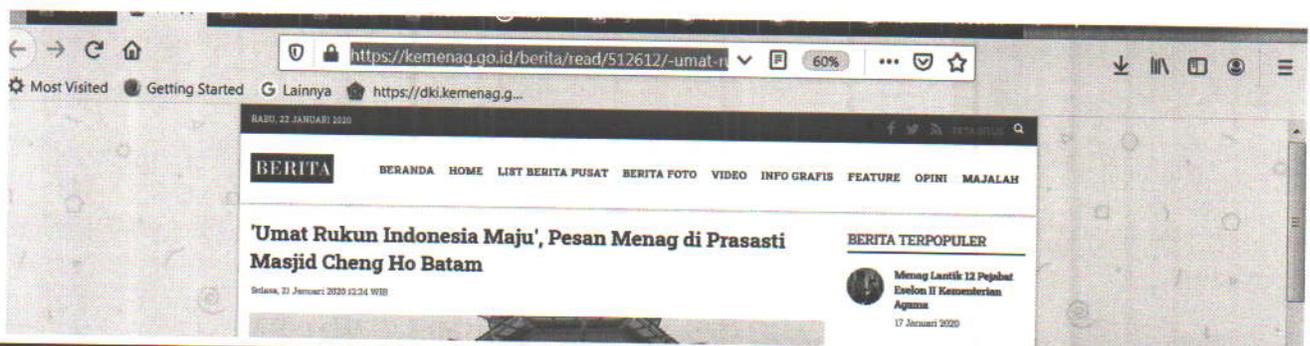
Kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut baik oleh Raja dan penduduk Indonesia saat itu. Laksamana Cheng Hoo tercatat pernah singgah di Aceh, Palembang dan beberapa tempat di Pulau Jawa. Ia seorang muslim tulen dan anak dari Haji Ma Ha Zhu dan ibunya berasal dari marga Oen (Wen) Tiongkok. Laksamana Cheng Ho juga pernah diberi kepercayaan oleh Kaisar Cina Yongle yang pernah berkuasa pada tahun 1403 hingga 1424.

Sumber : -

Penulis : benny andriyos

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512612/-umat-rukun-indonesia-maju---pesan-menag-di-prasasti-masjid-cheng-ho-batam->



Di Batam Menag Resmikan KUA, Gedung MTsN dan Rumah Moderasi Beragama

Batam (Kemenag) --- Menteri Agama Fachrul Razi dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepulauan Riau hari ini meresmikan sejumlah gedung yang dibangun melalui skema pembiayaan SBSN dan bantuan Kementerian PUPR. Menag juga meresmikan Rumah Moderasi Beragama STAIN Sultan Abdurrahman.

Peresmian sejumlah gedung tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menag. Ikut mendampingi, Kakanwil Kemenag Kepri Mukhlisuddin, Plh Dirjen Bimas Islam Tarmizi Tohor dan perwakilan Pemprov Kepri.

Peresmian ini berlangsung bersamaan gelaran silaturahmi Menag bersama tokoh lintas agama dan keluarga besar ASN Kemenag Provinsi Kepulauan Riau. Menag juga menyerahkan SK Penyuluh Agama Non PNS kepada perwakilan enam agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Hadir juga dalam peresmian dan silaturahmi tersebut, Forkominda Provinsi Kepulauan Riau, para pelajar madrasah, tokoh masyarakat dan tokoh adat melayu di Kota Batam.

Berikut bangunan yang diresmikan Menag di Kota Batam:

1. KUA Kecamatan Bintang Pesisir, Kabupaten Bintang
2. KUA Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna,
3. Gedung MTsN1 Batam,
4. Asrama Siswa Terpadu MAN Tanjung Pinang.

Menag juga menandatangani prasasti Rehab Ruang Kelas Belajar MAN Batam dan Ruang Kelas Belajar MAN 2 Natuna. Keduanya dibangun dengan dana bantuan dari Kementerian PUPR.

Di hadapan keluarga besar ASN Kemenag Kepri, Menag berpesan untuk senantiasa menjadi garda terdepan menjaga kesetiaan NKRI. "Kalau ada ASN Kemenag Kepri yang tidak setuju dengan Moderasi Beragama maka dia tidak perlu lagi ada di Kementerian Agama," tanda Menag.

Sumber : -

Penulis : benny andriyos

Editor : Khoiron

<https://kemenag.go.id/berita/read/512611/di-batam-menag-resmikan-kua--gedung-mtsn-dan-rumah-moderasi-beragama>



Pesan Menag di Prasasti Masjid Cheng Ho, "Umat Rukun Indonesia Maju"

Moeslimchoice. Usai memberi arahan dalam silaturahmi bersama tokoh lintas agama dan ASN Kemenag Kepulauan Riau serta meresmikan sejumlah bangunan KUA, Madrasah dan rumah Moderasi Bergama di Batam, Menag Fachrul Razi menunaikan Shalat Dzuhur di Masjid Muhammad Cheng Ho, Selasa (21/1).

Masjid dengan arsitektur bangunan Tiongkok ini pun langsung ramai. Menag disambut hangat dengan shalawat dan iring-iringan tabuhan Kompang. Turut mendampingi Menag, Kakanwil Kemenag Kepri, Mukhlisuddin; Plh Dirjen Bimas Islam, Tarmizi Tohor; Sesmen, Khoiril Huda Basyir dan Forkominda Provinsi Kepulauan Riau dan Pemkot Kota Batam.

Usai menunaikan Shalat Dzuhur, Menag menandatangani prasasti sekaligus menuliskan pesan kerukunan. Pesan kerukunan yang ditulis Menag di atas prasasti berbunyi: Umat Rukun Indonesia Maju.

Masjid Muhammad Cheng Ho berdiri megah di kawasan Golden City, Bengkong Kota Batam. Masjid yang dibangun oleh seorang pengusaha Batam ini sebagai upaya mengenang sejarah perjalanan seorang Laksamana Tiongkok dan anak buahnya ke Indonesia yang membawa ajaran Islam. Keberadaan masjid ini sekaligus membuktikan kulturasi antara budaya China, Islam dan Indonesia yang terjalin begitu erat di kota Batam.

Masjid yang dibangun tanpa kubah ini dihiasi berbagai ornamen berpadu dengan rangkaian huruf-huruf Arab. Masjid Cheng Ho sendiri diresmikan oleh Menko Bidang Kemaritiman, Dwisuryo Indroyono Soesilo dan Menteri Pariwisata, Arief Yahya pada 21 Februari 2015.

Dari keterangan yang terpajang di dinding sebelah kanan masjid, Cheng Ho adalah seorang laksamana laut yang datang dari Tiongkok. Ia dipercaya memimpin ekspedisi pelayaran dengan membawa lebih kurang 27.000 anak buahnya berlayar menuju Indonesia. Peristiwa ini terjadi sebanyak 7 kali dalam kurun waktu di tahun 1416.

Kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut baik oleh Raja dan penduduk Indonesia saat itu. Laksamana Cheng Hoo tercatat pernah singgah di Aceh, Palembang dan beberapa tempat di Pulau Jawa. Ia seorang Muslim tulen dan anak dari Haji Ma Ha Zhu dan ibunya yang berasal dari marga Oen (Wen) Tiongkok. Laksamana Cheng Ho juga pernah diberi kepercayaan oleh Kaisar China, Yongle yang pernah berkuasa pada tahun 1403 hingga 1424. [mel]

Sumber : <https://www.moeslimchoice.com/read/2020/01/21/31876/pesan-menag-di-prasasti-masjid-cheng-ho-umat-rukun-indonesia-maju->

The screenshot shows the Moeslim Choice website interface. At the top, there is a navigation menu with categories like HOME, BERITA, POLHUKAM, NASIONAL, ISLAMTAINMENT, KAJIAN, WISATA, PENDIDIKAN, OPINI, MAJALAH, VIDEO, and INDEKS. Below the menu is a news ticker with the text 'Corong Rakyat Tunggu Novel Sumpah Pocong @ Rahu, 22 Januari 2020 | 07:25'. The main headline of the article is 'Pesan Menag di Prasasti Masjid Cheng Ho, "Umat Rukun Indonesia Maju"'. Below the headline, there is a sub-headline 'NASIONAL @ SELASA, 21 JANUARI 2020 | 18:35 WIB' and a featured image of the Cheng Ho Mosque. On the right side, there are social media icons for Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube, along with a 'Follow Moeslim Choice' button. At the bottom right, there is a small advertisement for 'ELUMIN' with the tagline 'Keeps Me in the Fastlane'.

Menag Sebut Sertifikasi Halal Ada dalam Omnibus Law

Batam - Kementerian Agama memperbaiki aturan sertifikasi halal dalam Omnibus Law. Pembetulan aturan itu dikatakan Menteri Agama Fachrul Razi di Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 21 Januari 2020.

"Omnibus Law mengoreksi pasal UU lain. Kalau di Kemenag, terkait sertifikat halal," kata Fachrul Razi, di Batam, seperti diberitakan *Antara*.

Menurut dia, sertifikasi halal belum berjalan sesuai keinginan. Sebab, ada yang dapat diurus dalam waktu singkat dan ada yang butuh waktu lama.

Fachrul mengatakan dengan perbaikan aturan, diharapkan sertifikat halal dapat selesai dalam waktu 21 hari pengurusan. Sehingga, dapat ditetapkan apakah sertifikat halal dapat diterbitkan atau tidak.

"Dengan tidak menyogok," ucap dia.

Selain sertifikat halal, Omnibus Law juga akan mengatur masalah wakaf. Menurut dia, aturan wakaf terlalu rumit karena seseorang yang ingin mewakafkan hartanya harus datang ke bank, menunjuk nadzir dan lainnya. Akibatnya, orang jadi mengurungkan niatnya tersebut.

"Dibuat terobosan, agar saat mau wakaf, hanya melalui HP, kirim, ATM langsung dapat akta dan langsung bisa jalan," ujarnya

ASN jangankan sampai melontarkan ujaran yang memecah belah bangsa.

Dia mengatakan hal tersebut karena wakaf adalah amal jariah. Apabila aturannya rumit, dikhawatirkan tidak ada yang mau melakukannya. Dengan aturan baru, maka dia berharap semakin banyak masyarakat yang bersedia mewakafkan hartanya.

Dalam kesempatan itu, Fachrul mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga sikap, Itu dikarenakan ASN adalah garda terdepan yang bersikap setia pada Pancasila.

Apabila ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi keras, berdasarkan kesepakatan 11 Menteri dan Kepala Lembaga.

"ASN jangankan sampai melontarkan ujaran yang memecah belah bangsa. Beri kode setuju saja, langsung dipanggil," tutur Fachrul Razi. □

Sumber : <https://www.tagar.id/menag-sebut-sertifikasi-halal-ada-dalam-omnibus-law>



Menag : Jangan Coba Main – main Dalam Penyajian Laporan Keuangan

JAKARTA.- Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak main-main dalam penyajian laporan keuangan. Menurutnya, kata “jangan coba main-main” adalah sikap yang harus dipegang teguh dalam pemeriksaan keuangan.

“Ada kata yang saya suka sekali mendengarnya: jangan coba main-main. Saya kira itu sikap kita bersama,” demikian disampaikan Menag dalam acara *Entry Meeting* Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 pada Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pemeriksa Keuangan Haji (BPKH), Jakarta, Senin, (20/01)

Hadir Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar, Auditor Utama Keuangan Negara V Novian Herodwijanto beserta seluruh jajaran BPK RI.

Turut mendampingi Menag, Sekretaris Jenderal M. Nur Kholis Setiawan, Plt. Inspektur Jenderal Thomas Pentury, beserta pejabat eselon I dan II lainnya.

Menag juga mengingatkan siapa saja yang terlibat dalam pengerjaan proyek yang ada di Kementerian Agama untuk tidak main-main. Penentuan pemenang lelang adalah karena mekanisme dan panitia mengangap yang terbaik.

“(Penentuan pemenang lelang) Bukan karena jasa Menag, bukan pula karena Wamen, bukan karena Sekjen atau Irjen, dan bukan jasa semua orang yang ada di sini. Oleh sebab itu, anda tidak hutang budi, apalagi uang satu sen pun kepada kami,” tegas Menag.

“Anda hanya hutang kepada bangsa dan negara ini. Kalau anda menyimpang dari itu, anda akan kami laporkan, dan anda akan kami minta dihukum seberat-beratnya,” lanjutnya.

Menag mengaku sudah menginstruksikan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk bersinergi dengan BPK demi kelancaran pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) tahun 2019.

“Kami semua percaya bahwa hasil pemeriksaan BPK ini akan menjadi masukan bagi kami untuk perbaikan kementerian agama dimasa datang,” tandas Menag.

Diketahui, BPK akan melakukan pemeriksaan pada Kementerian Agama tujuh puluh hari terhitung dari Senin, 20 Januari 2020. Ini merupakan kegiatan pemeriksaan rutin yang bertujuan memberikan opini laporan keuangan. (Red)

Sumber : <http://inapos.com/menag-jangan-coba-main-main-dalam-penyajian-laporan-keuangan/>



Menag Ingatkan Jajarannya Terkait Pemeriksaan BPK: “Jangan Main-Main”

JAKARTA, PRIPOS.ID (21/1/2020) – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak utama-utama dalam penyajian laporan keuangan. Menurutnya, kata “jangan coba main-main” adalah sikap yang harus dipegang teguh dalam pemeriksaan keuangan.

“Ada kata yang saya suka sekali dengarnya: jangan coba main-main. Saya kira itu sikap kita bersama, ”demikian disampaikan Menag dalam acara Rapat Masuk Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 di Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pemeriksa Keuangan Haji (BPKH), Jakarta, Senin, (20/01)

Hadir Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar, Auditor Utama Keuangan Negara V Novian Herodwijanto

Turut mendampingi Menag, Sekretaris Jenderal M. Nur Kholis Setiawan, Plt. Inspektur Jenderal Thomas Pentury, bersama pejabat eselon I dan II lainnya.

Menag juga mengingatkan siapa saja yang terlibat dalam pengerjaan proyek yang ada di Kementerian Agama untuk tidak main-main. Penentuan pemenang lelang adalah karena perubahan dan panitia menganggap yang terbaik.

“(Penentuan pemenang lelang) Bukan karena Menag, bukan karena Wamen, bukan karena Sekjen atau Irjen, dan bukan karena semua orang ada di sini. Oleh sebab itu, kamu bukan hutang budi, minta uang satu sen pun kepada kami, ”tegas Menag.

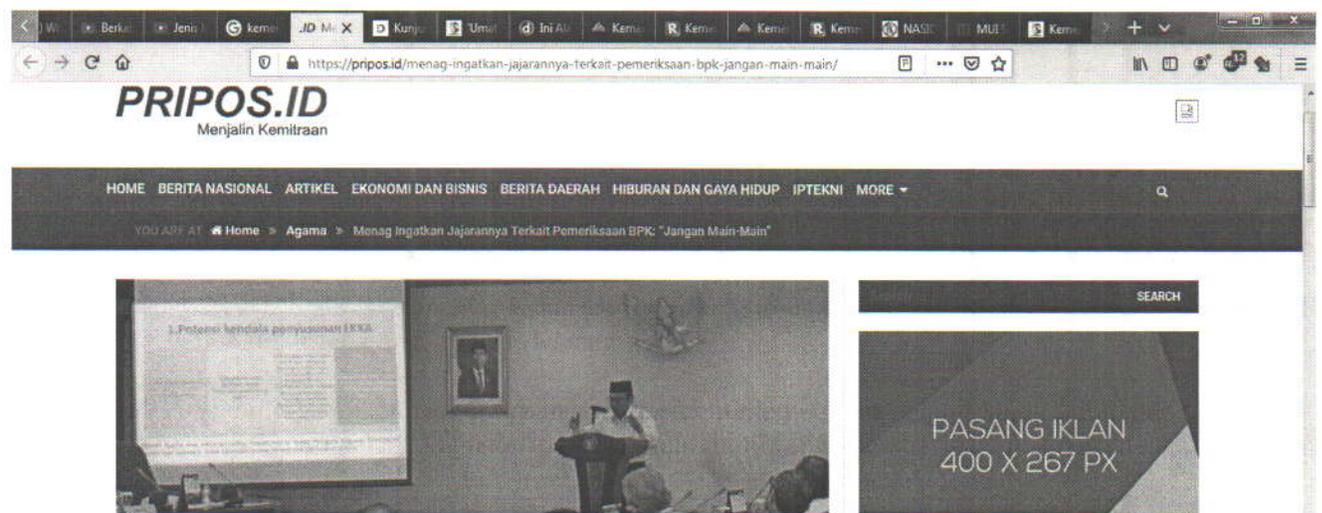
“Anda hanya perlu membayar untuk negara dan negara ini. Kalau kamu menyimpang dari itu, kamu akan kami laporkan, dan kamu akan kami minta seberat-beratnya, ”lanjutnya.

Menag mengaku sudah menginstruksikan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk bersinergi dengan BPK demi kelancaran memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) tahun 2019.

“Kami semua percaya pada hasil pemeriksaan BPK ini akan menjadi masukan bagi kami untuk perbaikan kementerian agama dimasa datang, ” tandas Menag.

Diketahui, BPK akan melakukan pemeriksaan pada Kementerian Agama selama tujuh puluh hari dari Senin, 20 Januari 2020. Ini merupakan kegiatan pemeriksaan rutin yang memberikan pendapat tentang laporan keuangan.(rusydi/ask)

Sumber : <https://pripos.id/menag-ingatkan-jajarannya-terkait-pemeriksaan-bpk-jangan-main-main/>



Kunjungi Maha Vihara Duta Maitreya, Menag Gelorakan Dunia Satu Keluarga

BATAM - Menteri Agama Fachrul Razi mengunjungi Maha Vihara Duta Maitreya yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Tiba di Vihara terbesar di Asia Tenggara itu, Menag disambut oleh ratusan pelajar di Komplek Maha Vihara Duta Maitreya.

Di hadapan keluarga besar dan pelajar yang menuntut ilmu di Maha Vihara Duta Maitreya, Menag mengelorakan kerukunan umat beragama sesuai tema Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Ke 74, 'Umat Rukun, Indonesia Maju'.

Menag juga mengajak sengenap yang hadir untuk bersama-sama menjalani misi Dunia Satu Keluarga yang menjadi motto dari pendidikan di Maha Vihara Duta Maitreya.

"Dunia satu keluarga. Engkau dan aku satu keluarga. Seluruh dunia satu keluarga. Beda suku dan agama kita tetap satu keluarga," kata Menag yang diikuti pelajar dan keluarga besar Maha Vihara Duta Maitreya, Selasa (21/01).

"Beda adat dan istiadat kita tetap satu keluarga. Beda tradisi dan budaya kita tetap keluarga," sambungnya.

Maha Vihara Duta Maitreya kerap dijadikan destinasi wisata untuk para pemeluk agama Buddha. Vihara ini didirikan pada 1991 di atas tanah seluas 4 hektar di bilangan Bukit Beruntung, Sungai Panas, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Maha Vihara Duta Maitreya diresmikan oleh Menteri Agama Malik Fadjar, pada tahun 1999.

Di akhir kunjungan di Maha Vihara Duta Maitreya, Menag menerima cinderamata berupa jam kebahagiaan yang mengandung pesan bahwa setiap detik umat Buddha senantiasa mendoakan kebahagiaan kepada Menag Fachrul Razi.

Tampak mendampingi Menag, Kakanwil Kemenag Kepri Mukhlisuddin, Kakankemenag Kota Batam, MUI, FKUB Kota Batam, Plh Dirjen Bimas Islam Tarmizi Tohor dan Sesmen Khoirul Huda Basyir. (*)

Sumber : <https://detak.co/detail/berita/kunjungi-maha-vihara-duta-maitreya-menag-gelorakan-dunia-satu-keluarga->

HOME POLITIK SELEBRITIS GAYA HIDUP MEGAPOLITAN EKONOMI PARLEMEN OPINI INFOGRAFIS DRONE INDEKS

Kunjungi Maha Vihara Duta Maitreya, Menag Gelorakan Dunia Satu Keluarga

TK / Regional / Selasa, 21 Januari 2020, 21:27 WIB

Selasa, 21 Januari 2020, 21:36 WIB
Bertemu Panitia Piala Presiden Esports, Menpora: Esports Akan Jadi Andalan di Olimpiade 2024 Paris

Selasa, 21 Januari 2020, 21:34 WIB
Kapal Wartawan Istana Terbalik, Abdul Kharis Sampalkan Rasa Prihatin

Selasa, 21 Januari 2020, 21:21 WIB

'Umat Rukun Indonesia Maju', Pesan Menag di Prasasti Masjid Cheng Ho Batam

Batam (ikhlasberamalnews) — Rintik hujan menguyur Kota Batam siang itu. Usai memberi arahan dalam silaturahmi bersama tokoh lintas agama dan ASN Kemenag Kepulauan Riau serta meresmikan sejumlah bangunan KUA, Madrasah dan rumah Moderasi Bergama, Menag Fachrul Razi menunaikan Salat Dzuhur di Masjid Muhammad Cheng Ho, Selasa (21/01).

Mesjid dengan arsitektur bangunan Tiongkok ini sontak ramai. Menag pun disambut dengan shalawat dan iringan tabuhan Kompang. Turut mendampingi Menag, Kakanwil Kemenag Kepri Mukhlisuddin, Plh Dirjen Bimas Islam Tarmizi Tohor, Sesmen Khoirul Huda Basyir dan Forkominda Provinsi Kepulauan Riau dan Pemkot Kota Batam.

Usai menunaikan Salat Dzuhur, Menag menandatangani prasasti sekaligus menuliskan pesan kerukunan. Pesan kerukunan yang ditulis Menag di atas prasasti yakni Umat Rukun Indonesia Maju.

Masjid Muhammad Cheng Ho berdiri megah di kawasan Golden City, Bengkong Kota Batam. Masjid yang dibangun oleh seorang pengusaha Batam ini sebagai upaya mengenang sejarah perjalanan seorang Laksamana Tiongkok dan anak buahnya ke Indonesia yang membawa ajaran Islam. Keberadaan masjid ini membuktikan kulturasi antara budaya China, Islam dan Indonesia terjalin begitu erat di kota Batam.

Masjid yang dibangun tanpa kubah ini dihiasi berbagai ornamen berpadu dengan rangkaian huruf-huruf Arab. Mesjid Cheng Ho diresmikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo dan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada 21 Februari 2015.

Dari keterangan yang terpajang di dinding sebelah kanan mesjid, Cheng Ho adalah seorang laksamana laut yang datang dari Tiongkok. Ia dipercaya memimpin ekspedisi pelayaran dengan membawa lebih kurang 27.000 anak buahnya berlayar menuju Indonesia. Peristiwa ini terjadi sebanyak 7 kali dalam kurun waktu di tahun 1416.

Kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut baik oleh Raja dan penduduk Indonesia saat itu. Laksamana Cheng Hoo tercatat pernah singgah di Aceh, Palembang dan beberapa tempat di Pulau Jawa. Ia seorang muslim tulen dan anak dari Haji Ma Ha Zhu dan ibunya berasal dari marga Oen (Wen) Tiongkok. Laksamana Cheng Ho juga pernah diberi kepercayaan oleh Kaisar Cina Yongle yang pernah berkuasa pada tahun 1403 hingga 1424.

Sumber : <https://www.ikhlasberamalnews.com/kemenag/umat-rukun-indonesia-maju-pesan-menag-di-prasasti-masjid-cheng-ho-batam/>

The screenshot shows a news article on the website 'ikhlasberamalnews.com'. The article title is 'Umat Rukun Indonesia Maju', Pesan Menag di Prasasti Masjid Cheng Ho Batam. The article is dated Selasa, 21 Januari 2020 12:24 WIB. The main image shows the facade of the Cheng Ho Mosque in Batam, featuring traditional Chinese architectural elements like a multi-tiered roof and ornate carvings. There are also smaller images showing a group of people and an interior view of a mosque.

Kemenag Identifikasi Nomor Seri Buku Nikah yang Dicuri

Jakarta (ikhlasberamalnews) — Sebanyak 366 buku nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Deket, Lamongan dicuri. Kasubdit Bina KUA Ditjen Bimas Islam Anwar mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan KUA Deket untuk mengidentifikasi nomor seri buku nikah tersebut.

“Sementara kasusnya dilaporkan ke kepolisian, Kami juga akan mengidentifikasi nomor seri buku nikah yang telah dicuri,” tegas Anwar di Jakarta, Selasa (21/01).

Menurutnya, buku nikah yang dibagikan ke KUA telah dilengkapi dengan nomor seri. Nomor seri buku nikah yang terdistribusikan ke KUA juga tercatat di Kantor Kemenag. Sehingga, nomor berapa saja buku nikah yang dicuri, bisa diidentifikasi.

“KUA atau Kemenag Lamongan akan segera menyampaikan laporan detail kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, tentang jumlah buku yang hilang berikut nomor serinya,” jelas Anwar

“Setelah teridentifikasi, kami akan membuat surat edaran ke Kanwil Kemenag Provinsi untuk diteruskan ke Kankemenag Kab/Kota hingga KUA. Isinya, bahwa buku dengan nomor seri dimaksud sudah tidak berlaku,” sambungnya.

Pencurian 366 buku nikah KUA Deket diketahui pada Minggu (19/1), saat salah satu pegawai, Siti Muzayamah, kerja lembur. Setibanya di KUA, Siti Muzayamah mendapati pintu belakang kantor sudah terbuka. Setelah melakukan pengecekan, ternyata pintu ruang Kepala KUA juga dirusak dan almari penyimpanan arsip terbuka.

Sumber : <https://www.ikhlasberamalnews.com/kemenag/kemenag-identifikasi-nomor-seri-buku-nikah-yang-dicuri/>

The screenshot shows a web browser displaying the news article. The website header includes the logo 'IKHLAS BERAMAL NEWS' and the tagline 'JAGA KEBERSAMAAN UMAT'. The navigation menu lists categories like BERANDA, HAJI DAN UMRAH, KUA, ZAKAT DAN WAKAF, KERUKUNAN, PENDIDIKAN ISLAM, BPJPH, OPINI, and KEMENAG. Below the menu, there are several news teasers with icons and titles. The main article is titled 'KEMENAG' and 'Kemenag Identifikasi Nomor Seri Buku Nikah yang Dicuri', with a sub-header '18 hours ago' and '2 Min Read'. A video player is visible below the article title. On the right side, there is a social media widget for 'Ikhlas Beramal News' with 13,158 likes and a Twitter widget for '@ibhatnews'.

Kemenag Tidak Wajibkan Penceramah Bersertifikat

Batam, HanTer - Kementerian Agama tidak mewajibkan seluruh pemberi ceramah agama mengantongi sertifikat, meski program sertifikasi tetap berjalan.

"Kami akan mengadakan penceramah bersertifikat. Siapa yang mau, yang enggak mau, ya, enggak apa-apa," kata Menteri Agama Fachrul Razi di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (21/1).

Ia mengatakan saat ini kebijakan itu masih dalam persiapan dan diharapkan selesai pada akhir bulan ini.

"Sedang disempurnakan. Mungkin, ya, saya rasa mestinya akhir bulan ini jadi, bulan-bulan depan sudah mulai," kata dia.

Kementerian Agama melibatkan sejumlah pihak dalam penerbitan sertifikasi itu, antara lain MUI dan BNPT.

Sertifikasi, terutama menekankan pengetahuan Pancasila

Meski begitu, seseorang tetap boleh memberikan ceramah tanpa berbekal sertifikat.

"Silahkan saja. Paling enggak, kami senang semakin banyak yang bersertifikat. Enggak membatasi," kata Menteri.

Dalam sambutannya dalam silaturahmi lintas agama di Batam, Menteri menceritakan pengalamannya saat mengunjungi beberapa negara di Arab.

Di salah satu negara, kata Menteri, materi ceramah bahkan menggunakan teks yang sudah disiapkan.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan negara.

Sumber : <https://www.harianterbit.com/nasional/read/116247/Kemenag-Tidak-Wajibkan-Penceramah-Besertifikat>

The screenshot shows a web browser displaying the article. The browser's address bar shows the URL: <https://www.harianterbit.com/nasional/read/116247/Kemenag-Tidak-Wajibkan-Penceramah-Besertifikat>. The website header includes the logo 'HARIAN TERBIT' and various navigation links. The main content area features the article title and a large image of a man. To the right, there is an advertisement for 'SUPER SMART' with the text 'FEEL THE MOST EXTREME SENSATION' and 'For inquiry call: 021 2956 0000'. Below the advertisement, there is a 'POPULER BERITA' section with two items: 'MEGAPOLITAN Polisi Bongkar Kasus Penculikan di Pulomas, Pelaku Menyerahkan Diri' and 'NASIONAL Adhie: Gus Dur Minta Gus Romli Jaga Nahdliyyin'. The browser's taskbar at the bottom shows the system clock as 09:19 on 1/22/2020.

Ini Alasan Kemenag Bandung Atur Teks Khotbah Jumat

Bandung - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung mewacanakan untuk mengatur teks khotbah salat Jumat. Teks khotbah disebut perlu diatur pemerintah untuk menangkal paham radikalisme di Kota Bandung.

Hal itu diungkapkan Kepala Kemenag Kota Bandung Yusuf Umar. Dia menyatakan wacana soal mengatur teks khotbah salat Jumat itu dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Agama merujuk hasil studi banding ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UAE).

"Karena pada prinsipnya kita ingin negara dan bangsa ini akan nyaman dan jauh dari radikalisme di Kota Bandung itu," ucap Yusuf kepada **detikcom**, Selasa (21/1/2020).

Yusuf mengatakan teks khotbah Jumat yang diatur Kemenag ini baru sekadar wacana. Pihaknya akan bertemu terlebih dahulu dengan Wali Kota Bandung guna meminta restu aturan itu.

Dalam pelaksanaannya nanti, sambung Yusuf, Kemenag akan menyusun naskah khotbah salat Jumat. Naskah yang sudah disusun nanti akan diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk diedit.

"(Teksnya) ya seputar kebangsaan saja, keumatan, dan bisa memberikan kesejukan umat itu. Tentang persatuan dan kesatuan, ya untuk kemaslahatan saja," tuturnya.

Yusuf menyatakan selama ini memang belum ada laporan atau kasus terkait khotbah salat Jumat di Bandung yang menyerempet radikalisme. Namun wacana pengaturan teks khotbah Jumat lakukan Kemenag untuk berjaga-jaga.

"Selama ini masih normatif. Namun kan kita menjaga-jaga itu saja takut ada masalah ke depan," ucapnya. (dir/ern)

Sumber : <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4867877/ini-alasan-kemenag-bandung-atu-teks-khotbah-jumat>

The screenshot shows a web browser displaying a news article on the detiknews website. The article title is "Ini Alasan Kemenag Bandung Atur Teks Khotbah Jumat" by Dony Indra Ramadhan, published on Tuesday, January 21, 2020, at 17:48 WIB. The article has 21 comments. The website header includes navigation menus for Home, Berita, Daerah, Internasional, detikX, Kolom, Blak Blakan, Pro Kontra, Infografis, Foto, Video, and Indeks. A sidebar on the right lists "Berita Terpopuler" with five items: 1. Toto Santoso Klaim Ratusan Warga Jadi Pengikut Tanpa Paksaan; 2. Surat Edaran RW soal Iuran Nonpribumi yang Viral Tak Jadi Diberlakukan; 3. Jokowi Rujuk Master Plan Antibanjir '73, PDIP: Anies Harus Berani Gusur; 4. Ulah Tak Termaafkan Pelaku 'Begal Bokong' Mahasiswi; 5. Saat Sebuah Surat Edaran RW Gecekerkan Warga Surabaya. The browser's address bar shows the URL: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4867877/ini-alasan-kemenag-bandung-atu-teks-khotbah-jumat.

Kemenag Buka Rekrutmen Petugas Haji 2020 Tingkat Daerah

Jakarta, MINA – Kementerian Agama (Kemenag) mulai membuka rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2020 tingkat daerah. Proses rekrutmen ini dilakukan secara berjenjang dan transparan, guna mendapatkan petugas yang memiliki kompetensi sekaligus komitmen dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Hal tersebut disampaikan Kasubdit Bina Petugas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Ahmad Jauhari, di Jakarta, sebagaimana laporan Kemenag yang dikutip MINA, Selasa (21/1).

“Rekrutmen petugas haji kita lakukan secara berjenjang. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran mulai dibuka sejak 20 hingga 29 Januari 2020,” jelas Jauhari.

Selanjutnya, menurut Jauhari peserta yang lulus seleksi administrasi di Tingkat Kabupaten/Kota akan diumumkan pada 31 Januari 2020. “Mereka kemudian akan mengikuti tes kompetensi tingkat pertama di Kabupaten/Kota pada 4 Februari 2020,” tutur Jauhari.

“Peserta yang lolos seleksi di Kabupaten/Kota, berhak mengikuti seleksi di tingkat Kanwil yang akan dilakukan pada 13 Februari 2020,” imbuhnya.(R/R1/P2)

Mi'raj News Agency (MINA)

Sumber : <https://minanews.net/kemenag-buka-rekrutmen-petugas-haji-2020-tingkat-daerah/>

The screenshot shows a web browser displaying a news article on the MINANEWS.NET website. The article title is "Kemenag Buka Rekrutmen Petugas Haji 2020 Tingkat Daerah" and it was published 16 hours ago. The main image shows three men in white uniforms, likely officials from the Ministry of Religion, looking at a document. The website's navigation bar includes categories like Beranda, Palestina, Indonesia, Internasional, Ekonomi, Halal, Pendidikan, Olahraga, and Artikel. A sidebar on the right lists "BREAKING NEWS" with items such as "Rapat Shaf Shalat Satukan Energi Fisika" and "Anies: Joserizal Adalah Teladan di antara Para". The browser's address bar shows the URL: https://minanews.net/kemenag-buka-rekrutmen-petugas-haji-2020-tingkat-daerah/.

Kemenag Buka Rekrutmen dan Seleksi Petugas Haji 2020

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) mulai menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk pelaksanaan ibadah haji 2020. Salah satunya membuka pendaftaran bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2020 tingkat daerah.

Proses perekrutan akan dilakukan dengan sistem berjenjang dan transparan. Hal ini dilakukan guna mendapat petugas yang memiliki kompetensi sekaligus komitmen dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Rekrutmen petugas haji kita lakukan berjenjang. Untuk tingkat Kabupaten/Kota pendaftaran dibuka sejak tanggal 20 sampai 29 Januari 2020," ucap Kasubdit Bina Petugas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Ahmad Jauhari dalam keterangan yang didapat *Republika*, Selasa (21/1).

Pengumuman peserta yang telah lolos seleksi administrasi di tingkat Kabupaten/Kota akan diumumkan akhir bulan, 31 Januari 2020. Selanjutnya mereka akan mengikuti tes kompetensi tingkat pertama di Kabupaten/Kota masing-masing pada 4 Februari 2020.

Peserta yang lolos tes kompetensi tingkat pertama lalu berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tes berikutnya akan dilakukan di Kanwil setempat dan dijadwalkan berlangsung pada 13 Februari 2020.

Sumber : <https://ihram.co.id/berita/q4g2kh430/kemenagbukarekrutmendanseleksipetugashaji2020>

The screenshot shows a web browser displaying a news article on the website ihram.co.id. The article title is "Kemenag Buka Rekrutmen dan Seleksi Petugas Haji 2020". The article is dated "Selasa, 21 Jan 2020, 13:41 WIB" and is reported by "Zahrotul Oktavia" and edited by "Muhammad Hafid". The main image of the article shows a person holding a black t-shirt with the text "PETUGAS HAJI INDONESIA 2019" printed on it. The article is part of a news feed on the website, with other headlines visible on the right side, such as "KPK Ultimatum Pelindung Harun Masuku", "Pansus Minta Kejaksaan Dukung Penegakan HAM di Papua", "Jabar Siapkan Strategi Pengembangan Wisata dan Produk Halal", "Guardiola Gir Kembali Jadi", and "Perjalanan Ka Saputra, dari Salah Satu Ak Termahal". The browser's address bar shows the URL "https://ihram.co.id/berita/q4g2kh430/kemenagbukarekrutmendanseleksipetugashaji2020". The browser's taskbar at the bottom shows the date "1/22/2020" and the time "09:27".

Kemenag Siap Umumkan Izin Baru Penyelenggara Umrah

IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Agama (Kemenag) akan segera mengumumkan pencabutan izin mutorarium untuk Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Tentang moratorium pemberian izin baru PPIU diatur melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2018.

"Pencabutan moratorium nanti akan kami umumkan," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Arfi Hatim saat dihubungi *Republika.co.id*, Selasa (22/1).

Arfi mengatakan, ada beberapa pertimbangan kenapa Kemenag melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuka kembali izin mutorarium PPIU setelah hampir tiga tahun ditutup.

Di antaranya kata Arfi, Kemenag ingin memberi kesempatan kepada Biro Perjalanan Wisata (BPW) untuk berusaha secara legal dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Selama ini banyak praktik-praktik tak legal dilakukan oknum travel dalam penyelenggaraan umrah.

"Karena salah satunya berdasarkan hasil sidak satgas umrah akhir tahun lalu kami menemukan beberapa BPW yang telah menerima pendaftaran jamaah umrah," katanya.

Selain itu, yang paling utama moratorium pemberian izin baru PPIU ini dicabut adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Terutama lapangan kerja di sektor wisata penyelenggara perjalanan ibadah umrah. "Termasuk membuka lapangan kerja baru," katanya.

Arfi mengaku dengan dibukanya izin baru umrah akan banyak travel-travel yang baru menjadi BPW menjadi PPIU. Menurutnya, Kemenag tidak kesulitan dalam mengawasi travel-travel umrah yang baru, jika ada kerjasama dengan semua pihak terkait. Seperti diketahui, saat ini ada 988 travel yang sudah memiliki izin sebagai PPIU.

"Insya Allah (tidak kesulitan melakukan pengawasan). Tentunya jika ada kerja bersama stakeholder lain yang terkait," katanya.

Menurut Arfi, saat ini semua aturan yang terkait dengan pencabutan moratorium izin PPIU sudah disiapkan. Termasuk menyiapkan Keputusan Menteri Agama (KMA) sebagai dasar hukum izin baru PPIU kembali dibuka.

Sebelumnya, Dirjen PHU Nizar Ali mengatakan, proses pengajuan izin baru nantinya akan melalui sistem *online*. Sistem *online* ini diharapkan akan memudahkan masyarakat mengajukan izin dan prosesnya akan lebih terbuka.

"Moratorium kita targetnya tanggal Akhir Januari kita buka, sistemnya kini menggunakan online karena kita menghindari sistem tatap muka supaya kesan yang selama ini di lontarkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa terhindari," kata Nizar saat menerima pengurus Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) di Kantor Kemenag Lapangan Banteng Jakarta, Selasa (14/1).

Hadir juga, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M. Arfi Hatim serta jajaran eselon III dan IV Ditbina Umrah dan Haji Khusus. Dalam beberapa bulan terakhir, Ditjen PHU tengah mengintensifkan pengawasan dan pembinaan terhadap Biro Perjalanan Wisata yang tidak memiliki izin sebagai PPIU.

Sejumlah BPW yang terbukti tidak memiliki izin sebagai PPIU telah diperiksa dan diminta untuk menghentikan aktivitasnya membuka pendaftaran jamaah umrah.

Pengawasan dan pembinaan ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Berbeda dengan UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang hanya memuat empat pasal tentang umrah, UU 8/2019 lebih detail, ada lebih 20 pasal yang membahas tentang umrah.

Salah satunya, pasal 122 yang mengatur, setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jamaah umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 6 miliar.

Sumber : <https://ihram.co.id/berita/q4gc5r430/kemenagsiapumumkanizinbarupenyelenggaraumrah>

Kemenag Umumkan 10 Pemenang Kompetisi Penelitian Berbasis Keluaran

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama melalui Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Badan Litbang dan Diklat telah memilih 10 judul penelitian pemenang kompetisi berbasis keluaran. Kompetisi penelitian ini digelar sebagai salah satu respon terhadap Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian Berbasis Keluaran.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Puslitbang LKKMO Muhammad Zain, di Jakarta. "Kompetisi ini merupakan pola baru dalam pembiayaan penelitian. Harapannya dengan pola baru ini, akan menghasilkan produk penelitian yang unggul dan lebih bermanfaat bagi masyarakat," ujar Zain, Selasa (21/01). Ini menurut Zain amat dimungkinkan untuk terjadi, karena dengan pola kompetisi ini peneliti diarahkan untuk mengubah konsentrasi pada hal substantif, yang semula disibukkan dengan hal yang bersifat administratif.

"Peneliti kita biasanya sibuk dengan hal-hal administratif, karena pembiayaan penelitian biasanya akan dilihat *by process*. Dengan pola ini, penelitian akan dilihat *by output* (keluaran)," jelas Zain. Zain pun berharap penelitian yang dilakukan akan lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya akan berkontribusi dalam penentuan kebijakan. "Kami berharap ini bisa mendorong peneliti agar lebih kompetitif dan kreatif. Hasil penelitiannya juga kami harap dapat berkontribusi dalam penentuan kebijakan Kementerian Agama," kata Zain.

Adapun 10 judul penelitian yang memperoleh Biaya Penelitian Kompetisi Penelitian Berbasis Keluaran pada Puslitbang LKKMO, sebagai berikut:

A. Bidang Lektur Keagamaan:

1. Nasionalisme Kebangsaan dalam Tafsir Al-Qur'an Jawa, Kajian Sosiologi Pengetahuan Tafsir Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi Karya Bakri Syahid 1981-1994, pengusul: Islah Gusmian;
2. Narasi Moderasi Beragama dalam Naskah Serat Carub Kandha, pengusul: Agus Iswanto, Asep Saefullah, dan Nurhata;

B. Bidang Khazanah Keagamaan:

1. Kajian Sumber-Sumber Persia tentang Sejarah Islam di Indonesia (Sejarah Masuknya Islam dan Pengaruh Persia di Indonesia), pengusul: Akmal Kamil, Siti Aaisyah
2. Silsilah Raja-raja Kesultanan Demak dalam Kitab Ulama Nusantara, pengusul: Ali Romdhoni, Nanang Nurcholis

C. Bidang Manajemen Organisasi:

1. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Sample Zona Integritas dan WBK Zona 1 2 3, pengusul: Widayanto Sukarni Khatamwaty dan Lissetiawaty;
2. Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Tanda Daftar Rumah Ibadah Konghucu Bio Kota Tangerang, pengusul: Wawan Wahyudin dan Itang;
3. Sejauhmana Keberhasilan Diklat PIM III (Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek perubahan peserta Diklat PIM III), pengusul: Sofyan Yamin;
4. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu di Provinsi Bali, pengusul: Ni Komang Supriyanti dan I Made Darmawan;
5. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jawa Timur atas Layanan Pemberian Surat Rekomendasi Ditjen Bimas Kristen Tahun 2019, pengusul: Amir Khamzah dan Lidya Susanti;
6. Evaluasi Diklat Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama, pengusul: Agustina dan Muh Abduh.

Surat Keputusan Pengumuman Pemenang Penelitian Berbasis SBKU dapat diunduh di [sini](#)

<https://kemenag.go.id/berita/read/512617/kemenag-umumkan-10-pemenang-kompetisi-penelitian-berbasis-keluaran>

MUI Sebut Wacana Kemenag Mengatur Naskah Khutbah Jumat Berlebihan

Merdeka.com - Wacana Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung mengatur tema dan naskah khutbah Jumat ditentang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rencana itu dianggap berlebihan jika tujuannya menjaga kehidupan toleransi umat beragama.

Sekretaris MUI Kota Bandung Irfan Syafrudin menyebutkan, masyarakat Kota Bandung tidak memiliki masalah dengan isu toleransi. Selama ini kehidupan antarumat beragama berjalan baik.

"Sepanjang sejarah di Kota Bandung, para tokoh atau pemuka agama tidak memiliki masalah mengenai isu tersebut. Sejak Indonesia merdeka, para mubaligh ada yang memberontak tidak? gitu aja," kata dia saat dihubungi, Selasa (21/1).

Berkaitan dengan penyediaan teks khutbah, MUI sudah menjalankannya sejak lama. Biasanya, naskah tersebut disebar pada momentum tertentu, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Itu pun sifatnya tidak wajib. Naskah dengan tema yang disiapkan bisa dipakai atau tidak bergantung kebutuhan pengurus masjid.

Naskah khutbah yang disediakan bisa sangat baik jika tujuannya untuk mempermudah penceramah. Artinya, niat penyediaan naskah bukan untuk menjaga toleransi. Karena isu tersebut bukan menjadi masalah utama di Kota Bandung.

"Sebetulnya kekhawatiran-kekhawatiran kaya gitu (naskah ceramah untuk menjaga toleransi) menurut saya agak berlebihan. Tapi kami terbuka (untuk berdiskusi dengan Kemenag Kota Bandung)," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama Kota Bandung mewacanakan naskah khutbah Jumat disiapkan pemerintah. Hal ini bertujuan agar rambu-rambu yang bisa mencederai kehidupan toleransi bisa dihindari.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Yusuf Umar mengatakan, wacana ini serupa dengan kebijakan yang menurutnya sudah diterapkan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

"Berdasarkan informasi, Abu Dhabi, teks khotbah disiapkan pemerintah. Dalam hal ini di Indonesia mungkin (naskah khutbah) lewat Kementerian Agama, dalam rangka dakwah ke masyarakat itu menyejukan dan mendoakan pemerintah menjadi baldatun toyibatun wa robun gofur," ucapnya di Kantor Pemerintah Kota Bandung.

Dia berharap wacana ini bisa mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat secara umum. Metode seperti ini diklaim bisa membuat ketenteraman bisa lebih mudah dijaga.

Isi dakwah pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau urgensi di tengah masyarakat. Seperti tema kehidupan bertoleransi sebagai negara menganut pancasila.

"(Contoh tema) Bagaimana kita hidup bertoleransi, bagaimana kita hidup di antar umat beragama ini supaya tetap rukun, aman damai dan hidup sesuai negara pancasila ini bagaimana agar masyarakat melaksanakan ajaran agamanya dengan tenang tanpa mengganggu yang lain," ucap dia. [cob]

Sumber : <https://www.merdeka.com/peristiwa/mui-sebut-wacana-kemenag-mengatur-naskah-khutbah-jumat-berlebihan.html>



Moratorium Izin Baru PPIU Segera Dicabut

● ALI YUSUF

Ke depan, pengajuan izin baru melalui sistem *online*.

JAKARTA—Kementerian Agama (Kemenag) akan segera mencabut moratorium izin baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan menghentikan pengajuan izin baru PPIU sudah berlangsung sejak April 2018 dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang moratorium izin baru PPIU.

"Pencabutan moratorium nanti akan kami umumkan," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag Arfi Hatim saat dihubungi *Republika*, Selasa (21/1).

Menurut Arfi, ada beberapa pertimbangan, sehingga Kemenag melalui Ditjen PHU membuka kembali pengajuan izin baru PPIU setelah hampir tiga tahun ditutup. Di antaranya, Kemenag ingin memberi kesempatan kepada biro perjalanan wisata (BPW) untuk berusaha secara

legal dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Menurut dia, selama ini, banyak praktik tak legal yang dilakukan oknum *travel* dalam penyelenggaraan umrah.

"Salah satunya berdasarkan hasil sidak satgas umrah akhir tahun lalu. Kami menemukan beberapa BPW yang telah menerima pendaftaran jamaah umrah," katanya.

Selain itu, pencabutan moratorium pemberian izin baru PPIU juga didasari pertimbangan untuk menciptakan lapangan kerja baru, utamanya lapangan kerja di sektor wisata penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Menurut Arfi, saat ini, semua aturan yang terkait pencabutan moratorium izin baru PPIU sudah disiapkan, termasuk menyiapkan Keputusan Menteri Agama (KMA) sebagai dasar hukum pengajuan izin baru PPIU kembali dibuka.

Menurutnya, Kemenag tidak kesulitan dalam mengawasi *travel-travel* umrah yang baru, jika ada kerja sama dengan semua pihak terkait. Saat ini, ada 988 *travel* yang memiliki izin sebagai PPIU.

"Insya Allah, (tidak kesulitan melakukan pengawasan). Tentunya,

jika ada kerja bersama *stakeholder* lain yang terkait," katanya.

Sebelumnya, Dirjen PHU Kemenag Nizar Ali mengatakan, nantinya proses pengajuan izin baru PPIU melalui sistem *online*. Sistem ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengajukan izin dan prosesnya jadi lebih terbuka.

"Moratorium kita targetnya akhir Januari kita buka, sistemnya kini menggunakan *online* karena kita menghindari sistem tatap muka supaya kesan yang selama ini dilonarkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa terhindari," kata Nizar, seperti dilansir laman resmi Kemenag.

Asosiasi Tour and Travel Muslim Indonesia (ATTMI) menyambut baik rencana Kemenag mencabut moratorium izin baru PPIU. ATTMI berharap, pencabutan moratorium dilakukan secepatnya, tidak perlu menunggu akhir Januari.

"Saya rasa, pembukaan moratorium ini lebih cepat lebih baik," ujar Ketua Umum ATTMI Efrizon saat dihubungi *Republika*, Selasa.

Ia menilai, pencabutan moratorium sangat penting sehingga *travel-travel* atau BPW yang belum memiliki izin sebagai PPIU bisa menerima

pembinaan dari Kemenag. Menurut dia, selama ini, Kemenag masih kurang dalam melakukan pembinaan.

"Kalau dari kami ATTMI yang berizin itu baru dua, yang tidak berizin banyak *banget*, itu yang harus dilakukan pembinaan," ujar dia.

Meski demikian, menurut Efrizon, *travel* atau BPW yang belum memiliki izin PPIU sangat menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan bisnis perjalanan wisata. Hal itu dilakukan supaya ketika BPW tersebut mengajukan izin menjadi PPIU tidak memiliki riwayat negatif.

Menurut Efrizon, sudah banyak simbiosis mutualisme antara PPIU dengan *travel non-PPIU* dalam menjalankan bisnis di bidang perjalanan wisata, dalam hal ini umrah. Bisnis yang dijalankan itu, di antaranya, pembelian tiket pesawat, pemesanan hotel, bus, pengurusan visa, dan keperluan lainnya.

"Bahkan, pertukaran-pertukaran penitipan jamaah pun sering dilakukan antara yang berizin dan tidak berizin," katanya.

Hal itu, lanjut Efrizon, harus dimanfaatkan oleh Kemenag untuk membina *travel-travel* yang belum memiliki izin PPIU.

■ ed: wachidah handasah

BSNP Ubah Prosedur UN

● INAS WIDYANURATIKAH

Kesiapan UNBK 2020 hampir 100 persen.

JAKARTA — Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyiapkan Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional (POS UN) yang baru. POS UN ini merupakan revisi POS UN sebelumnya yang sudah diumumkan sejak November tahun lalu. Perubahan prosedur yang dilakukan, yakni terkait dengan nomenklatur.

Menurut Ketua BSNP Abdul Mu'ti, revisi POS UN perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan program Merdeka Belajar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 43/2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Permendikbud tersebut ditandatangani pada 10 Desember 2019.

"Perubahan yang mendasar itu lebih banyak terkait dengan perubahan nomenklatur. Kalau secara substantif, penyelenggaraan ujian 2020 ini tidak ada perubahan yang mendasar," kata Mu'ti di kantor BSNP, Jakarta, Selasa (21/1).

Dia mengatakan, jadwal pelaksanaan UN juga tidak mengalami perubahan. UN akan dilaksanakan dimulai pada jenjang SMK pada 16-19 Maret 2020. Selanjutnya, disusul SMA/MA pada 30 Maret-1 April 2020.

Ujian untuk SMP/MTs dilakukan 20-23 April 2020. Adapun ujian susulan untuk SMA/MA dan SMK dilakukan pada 7-8 April 2020. Sementara, ujian susulan untuk SMP/MTs dilakukan pada 29-30 April 2020.

Mu'ti menegaskan, sistem ujian nasional juga tidak mengalami perubahan. Pertama adalah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan

Pensil (UNKP). Pihaknya juga sudah menyampaikan kisi-kisi UN ke dinas-dinas pendidikan, sehingga nanti penyusunan soal dilakukan oleh Kemendikbud.

BSNP mendorong sekolah dan satuan pendidikan untuk melaksanakan ujian menggunakan komputer. Mu'ti mengatakan, berdasarkan evaluasi, UNBK lebih memberikan akurasi dalam menggambarkan pendidikan Indonesia secara umum.

Sekretaris BSNP Arifin Junaidi mengatakan, kesiapan sekolah untuk UNBK 2020 sudah hampir 100 persen. Umumnya, satuan pendidikan yang mengajukan UNKP adalah dari

pendidikan kesetaraan dan kebanyakan berasal dari lembaga pema-syarakatan.

"Jadi, sampai sejauh ini, belum ada sekolah yang mengajukan untuk melaksanakan UNKP. Pengajuan dispensasi untuk UNKP hanya dari pendidikan kesetaraan," kata Arifin.

Anggota BSNP Kiki Yulianti menambahkan, salah satu evaluasi yang signifikan terkait UN 2020 adalah soal pengaturan untuk difabel. Pihaknya menyusun pengaturan yang lebih rinci untuk pelaksanaan UNBK bagi difabel. Pada tahun lalu sifat pengaturan ujian untuk difabel terbilang normatif.

"Tahun sekarang, pengaturannya lebih rinci. Sehingga, penyandang disabilitas yang ingin mengikuti UNBK dengan komputer, instruksi, dan tahapan-tahapannya yang harus disiapkan oleh puspendik," kata Kiki.

Diserahkan ke sekolah

Mu'ti mengatakan, BSNP tidak lagi menerbitkan POS Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Hal ini berkaitan dengan program Merdeka Belajar dari Mendikbud Nadiem Makarim yang menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah terkait USBN dan keputusan kelulusan siswa ke jenjang pendidikan yang berikutnya.

"Karena ditiadakan, maka POS USBN tidak diperlukan. Pelaksanaan ujian itu dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan," kata Mu'ti.

Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya telah resmi memberikan kebebasan bagi sekolah untuk melakukan ujian sekolah. Menurut Nadiem, hal ini menjadi salah satu langkah dalam tujuannya, yakni menciptakan kemerdekaan dalam belajar.

Menurut Nadiem, selama ini, semangat UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah jelas, yakni murid dievaluasi oleh guru dan kelulusan ditentukan melalui suatu penilaian yang dilakukan sekolah. Saat ini, kata Nadiem, yang terjadi adalah dengan adanya USBN semangat kemerdekaan itu tidak optimal.

"Karena dia harus mengikuti soal berstandar, kebanyakan pilihan ganda dan format yang hampir sama seperti UN," kata Nadiem.

Oleh sebab itu, pada 2020 USBN akan diganti dan dikembalikan kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri dengan mengikuti kompetensi dasar yang ada di kurikulum. Walaupun demikian, kata dia, perubahan ini tidak diwajibkan kepada setiap sekolah.

■ ed: mas alamil huda

PEMBAHASAN RUU ||||||||||||

Omnibus Law Gratiskan Sertifikasi Halal

JAKARTA—Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki pihaknya ikut dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja. Pembahasan yang melibatkan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga terkait ini berlangsung hingga pertengahan Januari lalu. "RUU Omnibus Law ini semangatnya pada percepatan waktu proses sertifikasi halal, baik di BPJPH, MUI, maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jadi harus ada kepastian waktu," ujar Mastuki di Jakarta, Selasa (21/01).

Mastuki mengatakan pembahasan terkait pembebasan biaya bagi usaha mikro dan kecil (UMK) saat mengurus sertifikasi halal muncul istilah di nol rupiahkan. "Di UU JPH sebelumnya menggunakan istilah "fasilitasi bagi UMK," terangnya.

Mastuki menegaskan, dalam pembahasan juga bakal mengoptimalkan peran dan fungsi LPH, auditor halal, dan penyelia halal untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. Sejumlah persyaratan, prosedur, dan mekanismenya akan disesuaikan. "Sanksi administratif dan sanksi pidana. Arahnya bagaimana mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Jadi pendekatan yang dikedepankan adalah persuasif dan edukatif. Karena itu, dalam pembahasan kami menghindari sanksi pidana, hanya sanksi administratif," katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan, penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan mandatory sudah tepat. Karena pendekatannya bersifat edukatif. "Sanksi administratif / Penalty lebih baik karena kedua sanksi ini bersifat edukatif. Kenapa tidak pidana, karena bukan merupakan perbuatan kriminal," ujarnya.

Ia menegaskan, diterapkannya Omnibus Law yaitu dengan semangat untuk mengharmonisasikan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sesuatu yang memiliki kesamaan tetapi dengan ketentuan yang berbeda. Ia mencontohkan, usia pada UU perkawinan berbeda dengan UU Pemilu, juga dengan UU Perlindungan Anak. Tentu perbedaan angka ini menimbulkan pertanyaan. (nas)